

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan dalam Bab IV, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip tata kelola BUMDes Argo Mulyo sebagian besar telah mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola sektor publik menurut Bambang Irawan (2024). Adapun kesimpulan tiap indikator dijelaskan sebagai berikut:

1. Transparansi dan Akuntabilitas

BUMDes Argo Mulyo telah menjalankan prinsip transparansi melalui keterbukaan informasi secara langsung kepada masyarakat, baik terkait layanan maupun kegiatan usaha. Meski belum menggunakan platform digital atau media sosial resmi, pengelola tetap membuka ruang komunikasi bagi warga yang ingin menyampaikan masukan. Proses pelaporan keuangan juga menunjukkan akuntabilitas yang memadai, dilakukan secara periodik kepada pemerintah desa sebelum disampaikan secara terbuka dalam forum Musdes. Selain itu, akuntabilitas sosial tercermin dari sikap tanggap BUMDes dalam menghadapi gangguan layanan publik, seperti air bersih, dengan langkah-langkah yang mengedepankan keadilan dan empati sosial.

2. Partisipasi Pemangku Kepentingan

Prinsip partisipatif sudah mulai diterapkan melalui Musyawarah Desa yang diadakan setiap tahun. Dalam forum ini, masyarakat, pemerintah desa, dan pengelola saling berdiskusi untuk mengevaluasi program serta menyampaikan

aspirasi. Peran masyarakat tidak hanya sebagai penerima layanan, tetapi juga mulai dilibatkan dalam perencanaan. Namun, partisipasi masih dominan pada forum-forum formal. Keterlibatan warga dalam pelaksanaan operasional harian atau pengawasan langsung terhadap program masih belum optimal dan menjadi ruang yang perlu ditingkatkan agar prinsip partisipasi dapat benar-benar menyeluruh.

3. Efisiensi dan Efektifitas Operasional

BUMDes telah menunjukkan upaya optimalisasi sumber daya secara efektif, terutama dengan memberdayakan warga desa sebagai pegawai dan teknisi. Pemanfaatan tenaga kerja lokal mengurangi biaya pelatihan dan mempercepat proses adaptasi. Efisiensi juga ditunjukkan dari cara pengelola memilih mitra dan nasabah yang benar-benar kredibel untuk menghindari kredit bermasalah. Dalam hal inovasi, pembangunan kios semi pujasera serta penerapan Surat Perjanjian Kredit merupakan langkah nyata untuk meningkatkan kualitas usaha. Inovasi yang dilakukan tidak hanya fisik, tetapi juga administratif, guna meningkatkan ketertiban dan profesionalisme pengelolaan.

4. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Etika

BUMDes Argo Mulyo beroperasi berdasarkan landasan hukum yang jelas, yaitu Peraturan Desa dan SK Kepala Desa yang mendasari legalitas operasional. Setiap kebijakan baru selalu dikonsultasikan dengan pemerintah desa sebagai bentuk penghormatan terhadap struktur tata kelola dan prosedur yang berlaku. Dari aspek etika, BUMDes menunjukkan komitmen melalui sikap tanggap atas keluhan warga, serta tindakan empatik seperti pembebasan iuran saat layanan terganggu.

Kepatuhan ini tidak hanya ditunjukkan secara administratif, tetapi juga secara moral dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.

5. Pengukuran Kinerja dan Pelaporan

Pengukuran kinerja dilakukan secara sederhana namun relevan, dengan indikator seperti jumlah pelanggan aktif, tingkat pengembalian pinjaman, laba rugi, dan jumlah keluhan. Evaluasi dilakukan secara rutin dalam rapat internal dan dilaporkan kepada pemerintah desa dan masyarakat melalui Musdes. Walaupun belum menggunakan sistem digital, proses pengukuran dan pelaporan sudah berjalan konsisten dan dapat menjadi acuan pengambilan keputusan. Ini mencerminkan upaya akuntabilitas yang tidak hanya formal, tetapi juga substantif dalam pengelolaan BUMDes.

Secara keseluruhan, tata kelola BUMDes Argo Mulyo sudah menunjukkan keselarasan dengan prinsip-prinsip tata kelola sektor publik yang baik. Komitmen terhadap transparansi, partisipasi, efisiensi, kepatuhan hukum, dan pelaporan menunjukkan bahwa BUMDes ini bergerak menuju pengelolaan usaha desa yang profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Meskipun masih terdapat tantangan dalam hal teknologi dan partisipasi operasional, BUMDes Argo Mulyo telah membangun pondasi tata kelola yang solid untuk mendukung keberlanjutan usaha jangka panjang.

5.2 Saran

Berdasarkan berbagai temuan dan kesimpulan dalam penelitian ini, beberapa kelemahan yang masih terdapat dalam tata kelola BUMDes Argo Mulyo dapat ditindaklanjuti dengan saran berikut:

1. Mengatasi keterbatasan teknologi informasi

Mengingat BUMDes Argo Mulyo belum memanfaatkan media sosial atau sistem informasi digital secara optimal, maka disarankan agar pengelola mulai mengembangkan kanal informasi daring yang mudah diakses masyarakat, seperti akun media sosial resmi atau website sederhana. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan memperluas jangkauan informasi.

2. Mendorong partisipasi yang lebih aktif dan operasional

Partisipasi masyarakat saat ini masih terbatas pada forum-forum formal seperti Musdes. Oleh karena itu, BUMDes perlu membuka ruang partisipasi dalam kegiatan operasional, seperti monitoring program, pemeliharaan unit usaha, atau keterlibatan dalam tim pelaksana kegiatan desa agar masyarakat tidak hanya terlibat secara simbolis, tetapi juga secara teknis.

3. Memperluas inovasi berbasis potensi lokal

Inovasi di BUMDes saat ini baru menjangkau aspek administratif dan pembangunan fisik. Disarankan agar pengelola juga mengeksplorasi bentuk-bentuk inovasi lainnya, misalnya dalam pengemasan produk lokal, layanan berbasis digital, atau kerjasama usaha antar-BUMDes. Hal ini untuk memperkuat daya saing dan keberlanjutan usaha.

4. Perluasan indikator evaluasi kinerja yang lebih sistematis

Saat ini pengukuran kinerja masih bersifat manual dan terbatas. BUMDes disarankan menyusun indikator kinerja yang lebih spesifik, terukur, dan

konsisten antar unit usaha. Misalnya melalui pelaporan berkala berbasis format standar dan penggunaan aplikasi keuangan desa yang telah tersedia.

Dengan memperhatikan saran-saran tersebut, diharapkan BUMDes Argo Mulyo dapat memperbaiki kelemahan yang ada dan mengoptimalkan kekuatan yang telah dimiliki, sehingga mampu menjadi contoh tata kelola BUMDes yang baik dan berdaya guna bagi pembangunan ekonomi desa.